

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

**DYAN ANNISADYA HERMARANI
NIM : 15622300**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
memperoleh gelar sarjana ekonomi

OLEH :

DYAN ANNISADYA HERMARANI
NIM : 15622300

PROGRAM STUDI SI AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN
KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Diajukan Kepada :

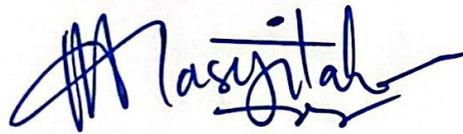
Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : DYAN ANNISADYA HERMARANI
NIM : 15622300

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Masyitah As Sahara, S.E., M. Si.
NIDN. 1010109101/ Lektor

Pembimbing Kedua,



Ranat Mulia Pardede, S.E., M. H
NIDN. 1012027801 / Asisten Ahli

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN
KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

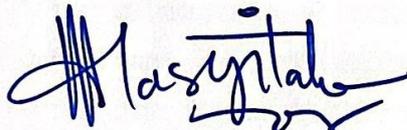
Yang dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : DYAN ANNISADYA HERMARANI
NIM : 15622300

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Delapan Agustus Dua Ribu Dua Puluh Dua dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

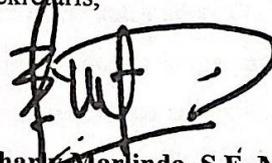
Panitia Komisi Ujian

Ketua,



Masvitah As Sahara, S.E, M. Si.
NIDN. 1010109101/ Lektor

Sekretaris,



Charly Marlinda, S.E, M.Ak. Ak. CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

Anggota,



Novi Chandra Saputra, S.E, M.Ak
NIDK. 8968410021 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 15 Agustus 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Dyan Annisadya Hermarani
NIM : 15622300
Tahun Angkatan : 2015
Index Prestasi Kumulatif : 3,33
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota
pada masa Pandemi COVID-19 di Provinsi
Kepulauan Riau

Dengan ini menyatakan sesungguhnya Seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini ssaya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 1 Agustus 2022



DYAN ANNISADYA HERMARANI

NIM : 15622300

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah S.W.T atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur saya ucapkan kepada- Mu ya Allah karena sudah memberikan orang- orang yang berarti, mencintai dengan tulus dan selalu mendukung segala perjuangan saya untuk sampai disini. Tugas akhir skripsi ini saya persembahkan kepada :

Orang tua saya tercinta

Ibu Nurmisnani dan Bapak Herman Supriono. Terimakasih atas dukungan ibu dan ayah selama saya hidup serta telah menjaga cucu selama dyan mengerjakan tugas akhir skripsi ini. I LOVE YOU <3

Mantan pacar yang sekarang telah menjadi suami saya dan buah hati kita tercinta

Riswanto dan Daffa Zuhairi Alfarizi bin Riswanto. Terimakasih abang sudah mendukung dyan selama ini, tidak henti-hentinya untuk mengingatkan untuk jangan menyerah. Anakku buah hatiku separuh jiwaku Daffa, makasi ya nak adek jadi anak yang baik selama momy ngerjain skripsi. I LOVE YOU GUYS BOTH TILL THE MOON AND

BACK :*

Adik- adikku

Dhimar Adya Wicaksono dan Dentang Kala Pijar Cahyo
Adik2 hebat dan pintar mba. Makasi sudah bantu jagain daffa :*

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani
seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya”

-Al-baqarah: 286

“life too short
So why would I ever stop?”

-Aespa

“I can do it!”

-Penulis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas ridhonya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling penulis yang mendukung dan membantu. Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S. E, M. Ak, Ak. Ca., selaku Kerua STIE Pembangunan Tanjungpinang,
2. Ibu Ranti Utami S. E, M. Si, Ak. Ca., selaku Wakil ketua I STIE Pembangunan Tanjungpinang,
3. Ibu Sri Kurnia S. E, M. Si, CA., selaku Wakil Ketua II STIE pembangunan Tanjungpinang
4. Bapak Imran Ilyas, M. M., selaku Wakil Ketua III STIE pembangunan Tanjungpinang
5. Bpk. Hendy Satria, SE., M.Ak, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang,
6. Ibu Masyitah As Sahara, S.E.,M.Si selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
7. Bpk. Ranat Mulia Pardede, S.E., M.H selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
8. Segenap Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
9. Ibu dan Ayah ku, Ibu Nurmisnani dan Bapak Herman Supriono yang telah mendidik, membesarkan dan mendoakan penulis tiada henti hingga penulis

bisa sampai disini serta terimakasih ibu dan ayah sudah mau membantu menjaga cucu selama dyan mengerjakan skripsi,

10. Suami dan Buah hatiku, Riswanto dan Daffa Zuhairi Alfarizi tercinta. atas cinta dan dukungan abang ke dyan selama ini, serta anakku buah hatiku, separuh jiwa mommy terimakasih nak sudah menjadi anak yang baik sewaktu mommy mengerjakan skripsi,
11. Adik-adikku, Dhimar Adya Wicaksono dan Dentang Kala Pijar Cahyo, sudah mau bantu gantian jaga daffa,
12. Kakak-kakak ex- satker yang comel, Kakak Metta Bayu Cahyanti Kusmajadi, Aning nirawati, Julia Marnisah, Raja Elfina,
13. Teman seperjuangan angkatan 2015 yang hampir di DO,
14. Dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terutama yang selalu nanyain kapan selesai, skripsi ini penulis persembahkan.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Tanjungpinang, 15 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.5.1 Manfaat Teoritis	9
1.5.2 Manfaat Praktis	10
1.6 Sistematika Penullisan.....	10
BAB II TINJUAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Teori	12
2.1.1 Keuangan Daerah	12
2.1.2 Kinerja Keuangan Daerah.....	15

2.1.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah.....	15
2.1.2.2 Tujuan Keuangan Daerah.....	19
2.1.3 Laporan Keuangan	20
2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	21
2.2 Kerangka Pemikiran	24
2.3 Peneliti Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Jenis Penelitian	32
3.2. Jenis Data dan Sumber data.....	32
3.3. Teknik Pengumpulan Data	32
3.4. Teknik Pengolahan Data.....	33
3.5. Teknik Analisis Data	35
3.6. Jadwal Penelitian	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.1.1 Gambaran umum objek penelitian	37
4.1.1.1 Provinsi Kepulauan Riau	37
4.1.1.2 Kabupaten Kota.....	38
4.1.2 Analisis Hasil Penelitian	46
4.2 Pembahasan	58
BAB V PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1.1	Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tanjungpinang TA. 2017-2018.....	3
1.2	Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas Kota Tanjungpinang TA. 2017-2018	4
1.3	Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas Kota Tanjungpinang TA. 2017-2018	4
1.4	Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD Kota Tanjungpinang TA. 2017-2018	5
1.5	Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kota Tanjungpinang TA. 2017-2018.....	5
1.6	Hasil Perhitungan Rasio Efektifitas Kota Tanjungpinang TA. 2017-2018	6
1.7	Hasil Perhitungan Rasio Efisien Kota Tanjungpinang TA. 2017-2018.....	6
2.1	Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan Daerah.....	16
2.2	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah	18
2.3	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah	19
3.1	Kriteria Penilaian Kemandirian Daerah.....	34
3.2	Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan Daerah.....	35
3.3	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah	35
3.4	Jadwal Penelitian	36
4.1	Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah.....	48
4.2	Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau TA. 2020	48
4.3	Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau TA. 2020	50
4.4	Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau TA. 2019-2020	52
4.5	Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan Daerah.....	54
4.6	Hasil Perhitungan Rasio Efektifitas Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau TA. 2020	55
4.7	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah	56

4.8 Hasil Perhitungan Rasio Efisien Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau TA. 2020	57
---	----

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bintan
Lampiran 2	Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lingga
Lampiran 3	Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Anambas
Lampiran 4	Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Natuna
Lampiran 5	Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Karimun
Lampiran 6	Laporan Realisasi Anggaran Kota Batam
Lampiran 7	Laporan Realisasi Anggaran Kota Tanjungpinang

ABSTRAK

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dyan Annisadya Hermarani. 15622300. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang

dy.annisadya@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau. Pengukuran kinerja keuangan kabupaten dan kota menggunakan analisis rasio keuangan daerah. Penelitian ini mengambil data dari laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan keuangan pemerintah (LKPD) pada situs web masing-masing kabupaten dan kota yaitu tahun anggaran 2020.

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Objek penelitian ini berupa data laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan keuangan pemerintah (LKPD) tahun 2020. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik pengolahan data mengumpulkan sumber data dari laporan keuangan, kemudian dilakukan pencatatan dan perhitungan menggunakan rasio keuangan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau pada kriteria rasio kemandirian keuangan daerah adalah sedang, pada rasio aktivitas menunjukkan belanja operasi lebih diprioritaskan dibandingkan belanja modal, pada rasio pertumbuhan menunjukkan setiap kabupaten dan kota mengalami kenaikan dan penurunan, pada kriteria rasio efektifitas menunjukkan kabupaten dan kota telah efektif dalam merealisasikan pendapatan di daerahnya dan pada kriteria rasio efisiensi menunjukkan sangat efisien.

Kesimpulan penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau sudah cukup mampu dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerahnya serta pengelolaan keuangan sudah cukup efektif dan efisien.

Kata Kunci : rasio keuangan, kemandirian, aktivitas, pertumbuhan, efektifitas, efisien.

Dosen Pembimbing I : Masyitah As Sahara, S.E, M.Si.

Dosen Pembimbing II : Ranat Mulia Pardede, S.E, M.H.

ABSTRACT

ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE DISTRICT AND CITY GOVERNMENTS IN KEPULAUAN RIAU PROVINCE

Dyan Annisadya Hermarani. 15622300. *Accountancy*. STIE Pembangunan
Tanjungpinang

dy.annisadya@gmail.com

The purpose of this study was to analysis of financial performance district and city governments in Kepulauan Riau Province. The measurement of district and city financial performance uses regional financial ratio analysis. This study takes data from the budget realization reports (LRA) and government financial reports (LKPD) on the websites of each district and city in 2020 fiscal year.

This research method uses quantitative methods. The object of this research is data on the budget realization report (LRA) and the government financial report (LKPD) for 2020. The data collection technique in this study uses documentation techniques. Data processing techniques collect data sources from financial reports, then record and calculate using regional financial ratios. The results of this study indicate that districts and cities in the Kepulauan Riau Province on the criteria of the regional financial independence ratio are moderate; the activity ratio shows that operating expenditures are prioritized over capital expenditures; the growth ratio shows that each district and city has increased and decreased; the effectiveness ratio criteria show that districts and cities have been effective in realizing income in their regions; and the efficiency ratio criteria show very efficiently.

The conclusion of this study is that the district and city governments in the Kepulauan Riau Province are quite capable of financing government activities, development, and community services in their areas, and financial management is quite effective and efficient.

Keywords: The financial ratios, independence, activity, growth, effectiveness, efficiency.

Advisor I : Masyitah As Sahara, S.E, M.Si.

Advisor II : Ranat Mulia Pardede, S.E, M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat bagi semua negara salah satunya Indonesia, pandemi Covid -19 muncul dan menyebar dengan sangat cepat yang menyebabkan gerak roda perekonomian melambat. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif yang terinfeksi COVID-19 mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya.

Menurut Damuri and Hirawan (2020) kasus penyebaran COVID-19 dapat dilihat dari dua pandangan ekonomi diantaranya permintaan dan penawaran. sisi permintaan, kondisi tersebut dapat mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, juga peningkatan harga transportasi dan perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, produktivitas buruh dan para pekerja akan mengalami penurunan, serta rantai pasokan global (*global value chain*) akan terganggu. Sedangkan pada konsumsi, perubahan akan terjadi pada pola konsumsi masyarakat. Masyarakat cenderung memilih untuk tidak melakukan perjalanan wisata tetapi lebih meningkatkan mengkonsumsi barang-barang pokok yang lebih penting dalam mengantisipasi terjadinya social distancing. Sementara itu, dari factor produksi, beberapa sektor utama di Indonesia juga selanjutnya berdampak akibat pandemi COVID-19, khususnya industri manufaktur. Produk yang berasal

dari industri manufaktur terutama ekspor akan melambat seiring meningkatkannya kasus penyebaran virus ini.

Sejak tanggal 17 Maret 2020, pertama kali masuknya virus tersebut di Provinsi Kepulauan Riau, berbagai antisipasi dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun Pemerintah Daerah untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 diantaranya menjaga jarak social dan fisik, belajar dari rumah (daring) untuk para pelajar, bekerja dari rumah untuk para pekerja, pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan bahkan rumah beribadah ditutup sementara, pendirian posko penanggulangan bahkan pengurangan kepadatan pekerja dari berbagai sektor yang berdampak pada aktifitas perekonomian masyarakat.

Terganggunya aktifitas perekonomian berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang berada di Provinsi Kepulauan Riau.

Kepulauan Riau memiliki 2 Kota yaitu Kota Tanjungpinang dan Kota Batam dan 5 Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga. Menurut Mardiasmo dalam (Sari et al., 2019) menyatakan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah ketidaktergantungannya pemerintah daerah dalam artian mampu untuk menggali dan mengelola sumber pendapatan keuangan asli daerahnya untuk memenuhi kebutuhan daerah mendukung jalannya sistem pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Laporan keuangan merupakan gambaran bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah itu sendiri, melalui penilaian kinerja keuangan daerah. Salah satu alat yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan menganalisis rasio keuangan daerah. Menganalisis rasio keuangan daerah menggunakan beberapa jenis rasio diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi.

Salah satu hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Nanda (2020) mengenai analisis rasio keuangan daerah pada Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2017 -2018 adalah diantaranya :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 1.1
Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2017-2018

Tahun Anggaran	Realisasi APBD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD (%)	Kriteria
2017	161.711.370.675	751.768.297.448	21,51	Instruksif
2018	160.470.588.593	760.634.235.523	21,09	Instruksif

Sumber : STIE Pembangunan Tanjungpinang (Nanda, 2020)

Berdasarkan tabel diatas bahwa rasio kemampuan Keuangan Daerah Kota Tanjungpinang pada periode tahun anggaran 2017-2018 masih sangat rendah dan mempunyai tingkat pola hubungan instruktif. Hubungan Instruktif memiliki arti dimana pemerintah pusat masih memiliki peranan yang dominan dibandingkan

tingkat kemandirian pemerintah daerah. Nilai terendah pada tahun 2018 yaitu bernilai sebesar 21,09% sedangkan pada tahun 2017 bernilai 21,51%.

2. Rasio Aktivitas

Tabel 1.2
Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas Kota Tanjungpinang
Tahun Anggaran 2017-2018

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Total Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Aktivitas
2017	749.052.227.186	903.977.646.140	82,86%
2018	728.826.818.572	835.565.086.617	87,23%

Sumber : STIE Pembangunan Tanjungpinang (Nanda, 2020)

Berdasarkan tabel diatas diketahui rasio aktivitas belanja operasi pada tahun 2017 sebesar 82,86% sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 87,23%.

Tabel 1.3
Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas Kota Tanjungpinang
Tahun Anggaran 2017-2018

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Total Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Aktivitas
2017	154.761.518.954	903.977.646.140	17,12%
2018	106.106.337.058	835.565.086.617	16,53%

Sumber : STIE Pembangunan Tanjungpinang (Nanda, 2020)

Berdasarkan tabel diatas diketahui rasio aktivitas belanja modal pada tahun 2017 sebesar 17,12% sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 16,53%. Semakin tinggi persentase anggaran yang dialokasikan untuk belanja

operasi. Maka, semakin kecil persentase belanja pembangunan (investasi) yang disediakan untuk sarana dan prasarana ekonomi bagi masyarakat.

3. Rasio Pertumbuhan

Tabel 1.4
Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD Kota Tanjungpinang
Tahun Anggaran 2017-2018

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Persentase Pertumbuhan
2017	161.711.370.675	35.665.629.937	28,29%
2018	160.470.588.593	-1.240.782.082	0,76%

Sumber : STIE Pembangunan Tanjungpinang (Nanda, 2020)

Berdasarkan tabel diatas diketahui rasio pertumbuhan PAD pada tahun 2017 sebesar 28,29% sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,76%. Yang berarti pada tahun 2018 menunjukkan pertumbuhan negative. maka dari itu, pada persentase pertumbuhan semakin menurun.

Tabel 1.5
Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kota Tanjungpinang
Tahun Anggaran 2017-2018

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Persentase Pertumbuhan
2017	913.479.668.123	35.182.031.123	3,70%
2018	921.104.842.116	7.625.173.993	0,83%

Sumber : STIE Pembangunan Tanjungpinang (Nanda, 2020)

Berdasarkan tabel diatas diketahui rasio pertumbuhan Pendapatan pada tahun 2017 sebesar 3,70% sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan

sebesar 0,83%. Yang berarti pada tahun 2018 persentase pertumbuhan mengalami kenaikan.

4. Rasio Efektifitas

Tabel 1.6
Hasil Perhitungan Rasio Efektifitas Kota Tanjungpinang
Tahun Anggaran 2017-2018

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektifitas	Kriteria
2017	161.711.370.675	155.024.506.313	104,32%	Sangat Efektif
2018	160.470.588.593	158.240.297.417	101,41%	Sangat Efektif

Sumber : STIE Pembangunan Tanjungpinang (Nanda, 2020)

Berdasarkan tabel diatas diketahui rasio efektifitas pada tahun 2017 dan 2018 melebihi 100% yang artinya anggaran pendapatan asli daerah yang direncanakan pemerintah Kota Tanjungpinang mencapai bahkan melebihi target yang dianggarkan.

5. Rasio Efisien

Tabel 1.7
Hasil Perhitungan Rasio Efisien Kota Tanjungpinang
Tahun Anggaran 2017-2018

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi	Kriteria
2017	903.977.646.140	913.479.668.123	98,96%	Kurang Efisien
2018	835.565.086.617	921.104.842.116	90,72%	Kurang Efisien

Sumber : STIE Pembangunan Tanjungpinang (Nanda, 2020)

Berdasarkan tabel diatas diketahui rasio efisiensi pada tahun 2017 dan 2018 tergolong tidak efisien. Kecenderungan ini pada dasarnya terjadi akibat besarnya total belanja dibandingkan total pendapatan yang diterima daerah, dimana diperhitungkan alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintahan terlampau besar dan dalam penyerapan penerimaan pendapatan kurang maksimal sehingga terjadinya kinerja keuangan yang tidak efisien.

Penggunaan analisis rasio keuangan daerah tersebar luas dan telah diterapkan pada perusahaan perdagangan. Di sisi lain, penggunaan analisis rasio keuangan di lembaga publik, terutama di pemerintah daerah, masih sangat terbatas. Bahkan, dengan menganalisis rasio keuangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pemerintah daerah dan menggunakannya sebagai referensi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Hal tersebut dikarenakan Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena adanya pembatasan penyampaian laporan keuangan kepada pemerintah daerah yang berbeda sifat dan ruang lingkupnya dengan penyampaian laporan keuangan oleh perusahaan. sehingga kurang memperhatikan perubahan yang terjadi pada struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan Rasio kemandirian keuangan daerah?
2. Bagaimana Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan Rasio Aktivitas?
3. Bagaimana Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan Rasio Pertumbuhan?
4. Bagaimana Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan Rasio Efektifitas?
5. Bagaimana Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan Rasio Efisiensi?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan Rumusan masalah yang ada, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Hal ini bertujuan untuk berfokus terhadap apa yang diteliti. Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota dari perhitungan Rasio Kemandirian keuangan Daerah, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektifitas dan Rasio Efisiensi tahun anggaran 2020. Penelitian ini mengambil data dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Kabupaten dan Kota Se- Provinsi Kepulauan Riau melalui situs web masing-masing Kabupaten dan Kota.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian adalah

1. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan Rasio Aktivitas.
3. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan Rasio Pertumbuhan.
4. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan Rasio Efektifitas.
5. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan Rasio Efisiensi.

1.5 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi penulis, dilakukan penelitian ini bukan sekedar untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi, tetapi juga sebagai sarana implementasi teori-teori yang didapatkan semasa penulis berkuliah. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat

menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dengan sampel penelitian yang lebih banyak dan dengan pemecahan masalah yang berbeda.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, sebagai bahan masukan dan gambaran dalam menentukan kebijakan dan strategi untuk memperbaiki Kinerja Keuangan yang lebih baik
2. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dalam teori dan praktek dalam hal kinerja keuangan pada organisasi publik.

1.6 Sistematika penulisan

Secara garis besar sistem penulisan laporan ini dari dibagi atas lima bab yang kemudian menjadi sub-sub sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang , perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : STUDI PUSTAKA

Merupakan telaah pustaka yang menjadi acuan permasalahan teoritis pada penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data, model pengumpulan data, teknik pengolahan, analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa secara kuantitatif serta pembahasan hasil penelitian

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Keuangan Daerah

Menurut Hakim dalam (Sari et al., 2021) Perimbangan keuangan negara antara pusat dan daerah dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu secara signifikan telah membawa perubahan yang fundamental dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah baik sistem regulasi, sistem pengawasan dan yang pokok utama yaitu urusan pertanggung jawaban keuangan. Hal ini merupakan wujud pemberian kewenangan yang lebih luas untuk penyelenggaraan keuangan negara dari pemerintah pusat ke pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota yaitu tuntutan akuntabilitas sektor publik. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya transparansi dan pemberian informasi keuangan Pemerintah Daerah kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas publik inilah menjadi kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Dengan adanya tuntutan akuntabilitas tersebut bisa mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif (Latif et al, 2019).

Menurut Ahmad Yani (2013) Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang atau barang sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi dan lainnya yang dapat dijadikan kekayaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2014).

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Iqbal (2012) Pengelolaan keuangan daerah adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan.

Menurut Khusaini (2018) pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Jadi, Keuangan Daerah merupakan hak pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah atau yang disebut pendapatan asli daerah dan sumber- sumber pendapatan lain dalam rangka pembangunan untuk meningkatkan kekayaan daerahnya. oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 yang mengatur bahwa kepala daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Melalui laporan keuangan dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan suatu Pemerintah Daerah.

2.1.2 Kinerja Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Windyu Putra (2018) pengertian kinerja keuangan daerah adalah salah satu bentuk pengukuran dalam penggunaan anggaran keuangan dengan asas manfaat dan efisiensi. Setelah adanya operasional anggaran, dalam organisasi sektor publik menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik pengukuran selanjutnya untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen.

Kinerja keuangan daerah adalah pengukuran kinerja yang menggunakan rasio keuangan daerah sebagai indikator keuangan daerah. Hal ini dilakukan untuk mengukur akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah. Bukan hanya untuk mengetahui bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi akuntabilitas untuk mengetahui secara efisien, efektif, dan ekonomis uang tersebut dibelanjakan.

Menurut Susanto (2014), adapun rasio keuangan dalam menilai kinerja pemerintah daerah yaitu :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan daerahnya sendiri dalam lingkup pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat melalui pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan yang diperlukan daerah. Nilai besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah diperbandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi maupun dari Pinjaman Daerah lain adalah gambaran ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal (Pemerintah

Pusat atau Provinsi). Persentase rasio kemandirian semakin tinggi artinya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan pihak lain semakin rendah. Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggunakan perbandingan antara Pendapatan asli Daerah dengan bantuan dari Pemerintah Pusat atau Provinsi dikalikan seratus persen adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase PAD	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,00 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam (Susanto, 2014)

2. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah gambaran prioritas pemerintah daerah dalam mengalokasikan dananya pada belanja operasi dan belanja belanja modal secara optimum. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti semakin kecil persentase belanja modal dalam menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat. Penilaian Rasio aktivitas Keuangan Daerah yaitu membandingkan antara total belanja operasi dengan Total APBD belanja dikalikan seratus persen. Begitu pula total belanja pembangunan.

Rasio Belanja Operasi	=	$\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$	x 100%
Rasio Belanja Modal	=	$\frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$	x 100%

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan PAD, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi daerah yang perlu memperoleh perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan PAD, maka semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai pada setiap periode Tahun Anggaran. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Keuangan daerah dirumuskan sebagai berikut :

% Pertumbuhan PAD	=	$\frac{\text{Pendapatan tahun } p - \text{PAD Tahun } p - 1}{\text{PAD tahun } p - 1}$	x 100%
% Pertumbuhan total pendapatan	=	$\frac{\text{Pendapatan tahun } p - \text{PAD Tahun } p - 1}{\text{PAD tahun } p - 1}$	x 100%
Keterangan : p = tahun yang dihitung, $p - 1$ = tahun sebelumnya			

4. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan dengan perbandingan target PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kriteria Kemampuan daerah dapat dikatakan telah efektif, jika

Semakin tinggi persentase rasio efektifitas yang dicapai minimal 100%, maka semakin baik. Secara umum, nilai efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam (Susanto, 2014)

Rumus penghitungan Rasio efektifitas sebagai berikut :

$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$
--

5. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan besaran biaya pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. kriteria kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan efisien apabila rasionya kurang dibawah 100% atau kurang dari satu. Dikatakan kinerja Pemerintah Daerah semakin baik maka semakin kecil rasio efisiensi diperoleh.

Tabel 2.3
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100 %	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam (Susanto, 2014)

Rumus penghitungan Rasio efisiensi sebagai berikut :

$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan/ Belanja}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$
--

Penggunaan analisis rasio memfokuskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yakni dengan perbandingan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode tahun sebelumnya, sehingga kecenderungan yang terjadi dapat diketahui. Selain itu dapat pula mengukur perbandingan rasio keuangan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah dengan daerah lain yang memiliki potensi daerah relatif sama guna mengetahui rasio keuangan daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lain.

2.1.2.2 Tujuan Kinerja Keuangan Daerah

Tujuan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Sinambela, Saragih & Sari dalam (Saragih et al., 2020) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

1. untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.3 Laporan Keuangan

Menurut Munawir dalam (Jurmabis, 2016) Laporan keuangan adalah merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan data atau aktivitas perusahaan. Laporan keuangan sektor publik meliputi yaitu: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga (LK-K/L) dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK-SKPD). Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah meliputi: Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pelaporan keuangan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi dimaksudkan untuk memberikan informasi yang berguna diantara lain:

1. Membantu memenuhi kewajiban akuntabilitas pemerintah terhadap publik
2. Membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi.

Untuk itu, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat. Laporan keuangan yang disampaikan meliputi:

1. Laporan Realisasi APBD, informasi membandingkan antara realisasi dengan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan setiap fungsi, organisasi dan jenis selama satu tahun anggaran.
2. Neraca, informasi posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal akhir tahun anggaran.
3. Laporan arus kas, informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemda selama satu tahun anggaran.
4. Catatan atas laporan keuangan, informasi yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi APBD, neraca, dan laporan arus kas. Laporan keuangan merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas.

2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU Nomor 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (UU Nomor 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,

yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dipertimbangkan dan diadopsi bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 (UU Nomor 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi. Hal ini mengandung arti bahwa APBD merupakan landasan untuk mengalokasikan pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan.
2. Proses perencanaan. Akibatnya, manajemen dapat menggunakan APBD sebagai pedoman dalam menyusun rencana mereka untuk tahun yang bersangkutan.
3. Peran pengawasan. Dengan demikian, APBD menjadi tolak ukur untuk menentukan berhasil tidaknya upaya implementasi..
4. Fungsi Alokasi. Artinya bahwa anggaran daerah untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

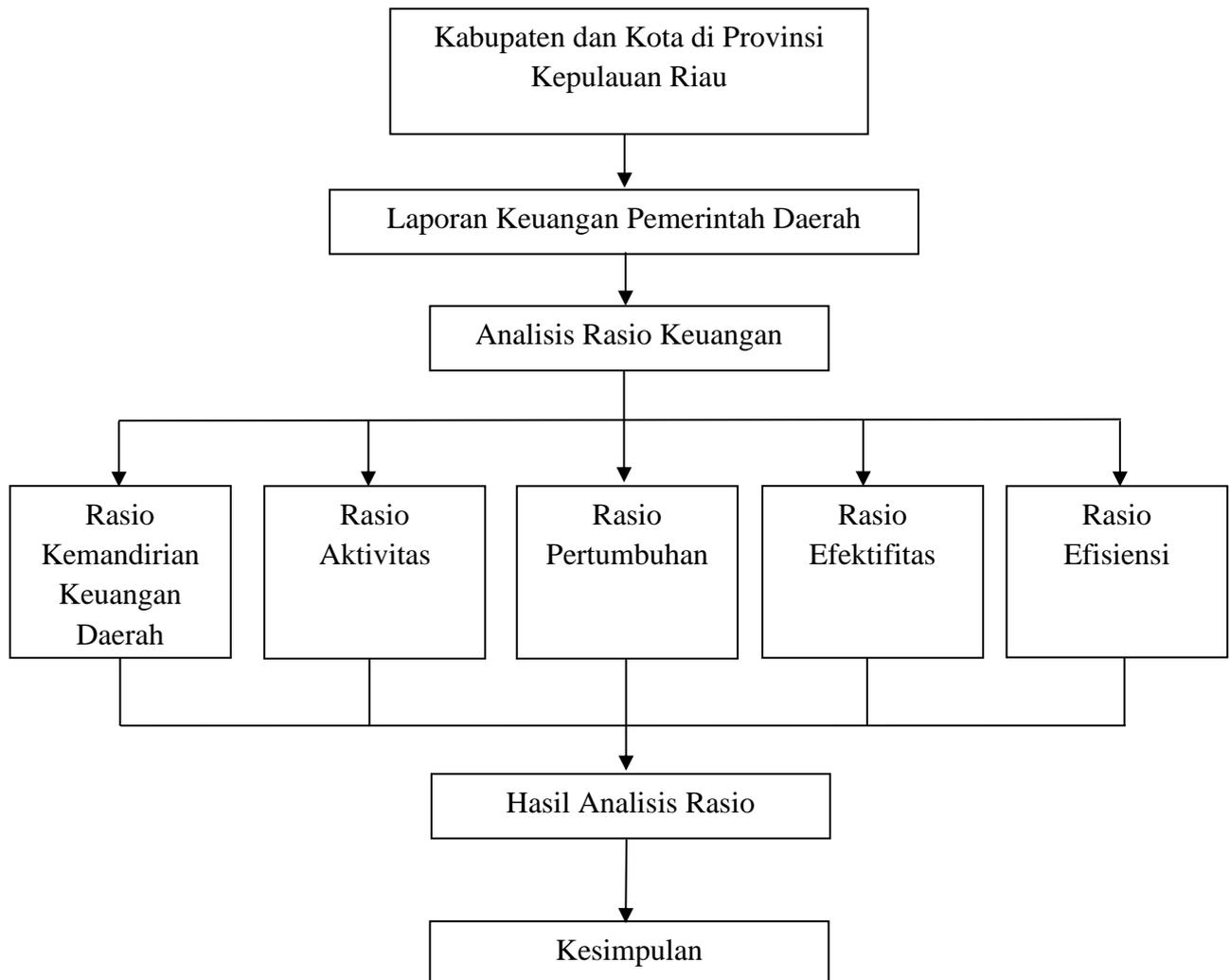
Menurut Halim dalam (Jurmabis, 2016), dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan. Hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
4. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berikut merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Konsep yang dikembangkan untuk penelitian (2022)

2.3 Peneliti terdahulu

- a. Penelitian oleh Sartika (2019) “Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti”. Hasilnya penelitian ini kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah cukup efisien dalam pengelolaannya sudah dapat menekan jumlah belanja daerahnya yang tidak melebihi pendapatan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 72,84%. Selain itu, Pemerintah Daerah sudah efektif dalam mengelola PAD. Hal ini terbukti dari rata-rata rasio efektifitas PAD sebesar 103,65%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PAD sudah dikatakan cukup baik dan sesuai dengan yang ditargetkan. Namun, masih terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah yaitu kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah, kontribusi PAD dalam penerimaan daerah dan bagaimana memprioritaskan alokasi dananya untuk belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Sehingga masyarakat bisa dirasakan langsung pembangunan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan IPM Kabupaten Kepulauan Meranti dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2020), “Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah

Kabupaten/Kota di Jawa Barat”. Hasil penelitian disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengukuran Rasio Desentralisasi Fiskal disimpulkan bahwa RKKD Kabupaten Kota di Jawa Barat mayoritas masih tergolong "KURANG", dimana sejumlah 17 Kabupaten-Kota atau 62,96% memiliki Rasio Desentralisasi Fiskal di bawah 20%. Komponen PAD yang menyumbang porsi besar pada realisasi PAD bersumber dari Pajak Daerah, berupa hasil pungutan BPHTB, PBB, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel, yang menunjukkan baiknya aktivitas ekonomi di masyarakat.
2. Hasil pengukuran Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah disimpulkan bahwa tidak ada yang beketergantungan keuangannya terhadap dana transfer masuk yang kedalam kategori “RENDAH”. Sebanyak tiga belas Pemerintah Kabupaten Kota masuk kategori "SEDANG" dan empat belas Pemerintah Kabupaten Kota kategori "TINGGI". Namun terdapat fakta, yaitu sebanyak Pemerintah daerah yang hasil pungutan Pajak Daerah-nya (bagian dari PAD) lebih besar dari Dana Alokasi Umum (bagian dari transfer pemerintah pusat). Keempat Pemerintah dimaksud yaitu Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Hasil pengukuran Rasio Efektivitas PAD bahwa pemerintah daerah di Jawa Barat telah efektif bahkan ada yang sangat efektif dalam

merealisasikan target PAD. 16 (enam belas) Pemerintah Kabupaten-Kota yang realisasi PAD-nya melebihi target PAD, yang jika diakumulasikan jumlah realisasi mencapai Rp 985 Miliar pada tahun 2018.

4. Hasil pengukuran Rasio Belanja Modal disimpulkan telah ada upaya dari Pemerintah Kabupaten-Kota di Jawa Barat untuk memaksimalkan Belanja Modal. Sebanyak 6 (enam) Pemerintah Kabupaten-Kota memiliki Rasio Belanja Modal melebihi rata-rata Belanja Modal.
- c. Penelitian oleh Keintjem Tiovanika E (2020), “Analisis Kinerja Keuangan dalam mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah pada masa pandemi COVID-19 di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil penelitian menyebutkan Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bitung tahun 2016 - 2020 masih dalam kategori kurang baik. Hal tersebut dibuktikan dari pengelolaan pendapatan asli daerah yang sudah baik, namun dari sisi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dan efisiensi belanja daerah yang belum baik. Adapun faktor penghambat kinerja keuangan daerah Kota Bitung adalah potensi daerah dalam hal pariwisata yang belum dioptimalkan bahkan belum dimanfaatkan. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bitung untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah dengan meningkatkan potensi-potensi daerah seperti pariwisata, perkebunan kelapa dan perikanan.
 - d. Penelitian oleh Harahap (2020) “Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah”. Hasil Penelitian menyebutkan kinerja

keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah secara umum dikatakan cukup baik, walaupun rasio derajat desentralisasi masih tergolong rendah, ketergantungan Pemerintah Pusat/Provinsi masih sangat tinggi serta penerimaan PAD tidak mencapai target yang dianggarkan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar dapat melakukan update data pengusaha-pengusaha yang menjadi wajib pajak daerah dengan cara melakukan kerja sama dengan instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas Perdagangan, dan sebagainya. Sehingga penghitungan potensi PAD sesuai dengan jumlah potensi sesungguhnya. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat menggali potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah yang baru dengan memanfaatkan sumber daya-sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, seperti pembukaan objek wisata baru yang dikelola oleh Pemda bekerjasama dengan masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah salah satunya retribusi parkir. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga harus meningkatkan sosialisasi manfaat pajak dan retribusi kepada masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara menurunkan personil di pasar-pasar atau tempat keramaian, sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

- e. Penelitian oleh Gayatria (2020) *“Analysis Of Regional Financial Performance Through The Independence Ratio, Effectiveness Ratio, And*

Growth Ratio In The District South Bangka". Hasil Penelitian menyebutkan antara lain : 1. *The financial performance of the local governments of the South Bank Agency in 2014-2018 is rated as moderate in terms of the regional financial independence ratio. This shows that the region's reliance on external sources remains very high.* 2. *Financial performance of the South Bank Regency Local Government from 2014 to 2018, as seen from the level of regional revenue effectiveness. This shows that South Bankage Regency local governments can achieve regional revenues that exceed their target budgets.* 3. *The 2014-2018 South Bank Agency Local Government's financial performance growth rate shows fluctuations. This means that the ability of local governments to maintain and increase the occasional profits remains volatile. This is due to an increase and decrease each year, with a significant decrease in 2018.* 4.4. *The reasons why the South Banka Local Government was unable to obtain the WTP title (unqualified) from the Local Government (LKPD) financial report are as follows. a) There is a problem with asset management from 2015 to 2016 under investigation. .. b) In addition to mutations, there are reduced asset and management tracking, and (BOS) issues, and capital spending to be reported by principal is reported by municipal assets.*

- f. Penelitian oleh Onibala (2021) “ Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara”. Hasil Penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut 1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dimasa pandemic Covid 19

(tahun 2020) jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berada pada kategori Sangat Kurang. 2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berada pada kategori Rendah sekali. 3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD berada pada kategori efektif. 4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berada pada kategori tidak efisien. 5. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara jika dilihat dari Rasio Keserasian dapat menunjukkan bahwa belanja operasi dan belanja modal belum seimbang. Karena Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara lebih memprioritaskan pengeluaran yang bersifat rutin dari pada pembangunan daerah. 6. Kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi COVID-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya tidak mengalami penurunan yang berarti.

- g. Penelitian oleh Sukarniati dan Azizah (2021), "*Financial Ratio Analysis of Yogyakarta Province Government*", Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa *the financial management in the DIY Province is verified as fairly good and establishes the financial condition with a pretty high index value. The short-term solvency has already been included in the good category. The ratio value is considered as high, which indicates many idle current assets that should be optimized for public services purposes. The budget solvency is considered good, even though it should be underlined the*

growth balance of the specific allocation fund revenue. Long-term solvency, service solvency, financial flexibility. Financial independence is categorized as good, but the role of regional government is still urgently required to maintain the stability of people's growth rate, the revenue balance of DAK, and operational expenses, as well as to optimize the economic activities to enhance the regional real revenue.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis jenis penelitian kuantitatif karena data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka dari laporan keuangan Daerah. Menurut Sugiono (2017), penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan tujuan dari penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori- teori dan hipotesis.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah tersedia dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variable angka atau bilangan yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diperoleh melalui website masing- masing Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau yaitu tahun 2020.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan sumber data dari laporan keuangan. Kemudian dilakukan pencatatan dan perhitungan, Penelitian ini juga dilakukan studi pustaka dengan menelaah maupun mengutip sumber tertulis lainnya yang berhubungan

dengan masalah penelitian yang dapat digunakan sebagai landasan teori penelitian.

3.4 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data berarti menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data adalah benar-benar memilih secara hati-hati data relevan dengan tepat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diperoleh melalui website masing- masing Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. untuk menilai kinerja keuangan menggunakan rasio kemandirian daerah, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, rasio efektifitas dan rasio efisiensi yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio kemandirian, partisipasi masyarakat sebagai komponen utama pembentuk PAD dalam membayar pajak dan retribusi daerah semakin tinggi. Kriteria Penilaian untuk mengukur Rasio Kemandirian Daerah adalah pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase PAD	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,00 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam (Susanto, 2014)

2. Rasio Aktivitas

Rasio Belanja Operasi	=	$\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$	x 100%
Rasio Belanja Modal	=	$\frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$	x 100%

3. Rasio Pertumbuhan

% Pertumbuhan PAD	=	$\frac{\text{Pendapatan tahun } p - \text{PAD Tahun } p - 1}{\text{PAD tahun } p - 1}$	x 100%
% Pertumbuhan total pendapatan	=	$\frac{\text{Pendapatan tahun } p - \text{PAD Tahun } p - 1}{\text{PAD tahun } p - 1}$	x 100%
Keterangan : p = tahun yang dihitung, $p - 1$ = tahun sebelumnya			

4. Rasio Efektifitas

Rasio Efektifitas	=	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}}$	x 100%
-------------------	---	--	--------

Tabel 3.2
Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam (Susanto, 2014)

5. Rasio Efisiensi

$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan/ Belanja}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$
--

Tabel 3.3
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100 %	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam (Susanto, 2014)

3.5 Teknik Analisis Data

Adapun Teknik analisis data yang dilakukan sebagai berikut :

1. Studi Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Menghitung data dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio aktivitas, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektifitas, dan Rasio Efisiensi
3. Studi Pustaka yaitu metode menggunakan berbagai literatur, artikel, jurnal dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian, hal ini dimaksud untuk mendukung pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti dan memperoleh pemahaman secara teoritis

3.6 Jadwal Penelitian

Tabel 3.4
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan				
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Penyusunan Proposal Penelitian					
2	Seminar Proposal Penelitian					
3	Perbaikan Hasil Seminar Proposal Penelitian					
4	Pengumpulan Administrasi Penelitian					
5	Pengumpulan Data					
6	Analisis dan Pengolahan Data					
7	Penyusunan Skripsi					
8	Sidang Skripsi					

Sumber : Peneliti (2022)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim and Muhammad Iqbal, 2012, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Ahmad Yani, 2013, *Hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Aisyiyah Yogyakarta, U., 2017, Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul Financial Ratio Analysis for Performance Appraisal at Gunung Kidul District Government Rigel Nurul Fathah a ARTICLES INFORMATION ABSTRACT E B B A N K:
- Damuri, Y. R. and Hirawan, F. B., 2020, Mengukur Dampak COVID-19 pada Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia 2020:
- Halim, A., 2014, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta
- Harahap, H. F., 2020, Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol. 4, no. 1, pp 34
- Jurmabis, 2016, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 6*, (S. E. , M. S. dkk Sapmaya Wulan, Ed.), Universitas Bandar Lampung Fakultas Ekonomi Studi Manajemen, Bandar Lampung
- Keintjem Tiovanika E., 2020, ANALISIS KINERJA KEUANGAN DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA, Advance Access published 2020
- Khusaini, 2018, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, UB Press, Malang
- Latif, A., Andriyana, Y., Rosada, H., and Cakra Maulana, A., 2019, Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Nanda, A. F., 2020, Analisis Rasio Keuangan untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Advance Access published 2020
- Oktalina, G., 2020, Analysis of Regional Financial Performance through the Independence Ratio, Effectiveness Ratio, and Growth Ratio in the District South Bangka, *International Journal of Finance Research*, Vol. 1, no. 2, pp 60–73

- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., Pingkan, I., and Rorong, F., 2021, DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA:, accessed at Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah
- Saragih, F., Siregar, I. A., Ekonomi, F., and Bisnis, D., 2020, ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA TEBING, Advance Access published 2020
- Sari, I., Asaari, M., Sefty, I., and Hidayah, N., 2019, Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers:
- Sari, I., Asaari, M., Sefty, I., and Hidayah, N., 2021, ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010-2019:
- Sartika, N., 2019, Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti:, accessed at Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis at www.ejournal.polbeng.ac.id/index.php/IBP
- Sugiono, 2019, *metode penelitian kuantitatif kualitatif daan R&D*, alfabeta, Bandung
- Sukarniati, L. and Az zakiiyah, N. A., 2021, FINANCIAL RATIO ANALYSIS OF YOGYAKARTA PROVINCE GOVERNMENT, *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, Vol. 6, no. 2, pp 215–231
- Susanto, H., 2014, ANALISIS PERKEMBANGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DALAM UPAYA Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Propinsi Nusa Tenggara Barat:
- Windhyu Putra, 2018, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, Rajawali Press, Depok
- Zulkarnain, Z., 2020, ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT, Vol. 3, no. 1

PERATURAN

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006

PP No 12 Tahun 2019, 2019, PP No 12 tahun 2019:

PP No. 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kota Administratif Tanjung Pinang [JDIH BPK RI], <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/71896/pp-no-31-tahun-1983> , accessed tanggal July 24, 2022.

PP No 58 Tahun 2005

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999

UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau [JDIH BPK RI], <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44480/uu-no-25-tahun-2002> , accessed tanggal July 24, 2022.

UU NO 33 TAHUN 2008

UU No. 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau [JDIH BPK RI], <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39682/uu-no-33-tahun-2008> , accessed tanggal July 26, 2022.

UU No. 61 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau” (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang [JDIH BPK RI], <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52323> , accessed tanggal July 24, 2022.

UU Nomor 32 Tahun 2004

UU Nomor 33 Tahun 2004

UUDrt No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau [JDIH BPK RI], <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51903/uudrt-no-19-tahun-1957> , accessed tanggal July 24, 2022.

CURRICULUM VITAE



Nama : Dyan Annisadya Hermarani
Tempat, tanggal lahir : Tanjungpinang, 25 Desember 1996
Agama : Islam
Alamat : Perum Asri Indah Jln. Kulai arah uban
Status : Menikah
No telp : 082284637570
Email : dy.annisadya@gmail.com

Pendidikan

SD : SD Negeri 002 Sagulung
SMP : SMP Negeri 8 Palembang
SMA : SMK Negeri 2 Tanjungpinang
S1 : STIE Pembangunan Tanjungpinang